

**FUNGSI KOORDINASI DIAGONAL DINAS SOSIAL  
DALAM PENGENDALIAN DAN PELAYANAN  
REHABILITASI GELANDANGAN DAN  
PENGEMIS DI KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

Oleh :

**LISTI RIMAYANI**

**2003100067**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

**Konsentrasi Administrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

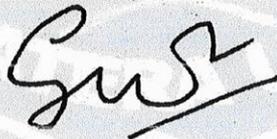
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : LISTI RIMAYANI  
NPM : 2003100067  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : FUNGSI KOORDINASI DIAGONAL DINAS SOSIAL  
DALAM PENGENDALIAN DAN PELAYANAN  
REHABILITASI GEI ANDANGAN DAN PENGEMIS DI  
KOTA MEDAN

Medan, 01 Agustus 2024

PEMBIMBING



**Assoc.Prof.Dr.SITI HAJAR,S.Sos.MSP**

DISETUJUI OLEH  
KETUA PROGRAM STUDI



**ANANDA MAHARDIKA, S. Sos., M.SP**

DEKAN



**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara oleh :

Nama : LISTI RIMAYANI

NPM : 2003100067

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada hari, Tanggal : Jum'at, 01 Agustus 2024

Waktu : 08.15 WIB s.d Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : ANANDA MAHARDIKA S.Sos,MSP

PENGUJI II : Dr.JEHAN RIDHO IZHARSYAH S.Sos,M.Si

PENGUJI III : Assoc.Prof.Dr.SITI HAJAR,S.Sos.MSP

### PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Sekretaris

Assoc.Prof. Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Listi Rimayani 200310067, menyatakan dengan ini sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau plagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pegetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara bertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi saya beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 30 Oktober 2024

Yang menyatakan



**Listi Rimayani**  
**2003100067**

## **ABSTRAK**

### **FUNGSI KOORDINASI DIAGONAL DINAS SOSIAL DALAM PENGENDALIAN DAN PELAYANAN REHABILITASI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA MEDAN**

**LISTI RIMAYANI**

**2003100067**

Masalah gelandangan dan pengemis merupakan salah satu tantangan sosial yang kompleks di banyak kota di seluruh dunia, termasuk di Kota Medan, Indonesia. Dimana, Kota Medan sebagai kota besar ketiga di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keberadaan gelandangan dan pengemis yang memiliki populasi gelandangan dan pengemis yang signifikan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Fungsi Koordinasi Diagonal Dinas Sosial Dalam Pengendalian Dan Pelayanan Rehabilitasi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan narasumber untuk mendeskripsikan fungsi koordinasi diagonal dinas sosial dalam pengendalian dan pelayanan rehabilitasi gelandang dan pengemis di kota Medan. Fungsi koordinasi diagonal dinas sosial dalam pengendalian dan pelayanan rehabilitasi gelandang dan pengemis di Kota Medan memiliki beberapa faktor yaitu meningkatnya jumlah penduduk, minimnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya jumlah urbanisasi sehingga menyebabkan semakin banyak jumlah gelandang dan pengemis di kota Medan, dengan adanya koordinasi diagonal Dinas Sosial diharapkan dapat mengurangi jumlah gelandang dan pengemis di Kota Medan.

***Kata Kunci : Koordinasi Diagonal, Gelandang Dan Pengemis, Kebijakan, Administrasi Publik***

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbil'alamin puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis masih bisa beraktivitas seperti biasa dan memberikan ridho-Nya di setiap hembusan nafas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Tidak lupa shalawat beringinan salam penulis hadiahkan kepada Nabi Kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sekarang ini.

Penulisan skripsi ini guna untuk memenuhi tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun Judul skripsi ini **“Fungsi Koordinasi Diagonal Dinas Sosial Dalam Pengendalian Dan Pelayanan Rehabilitasi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan”**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari skripsi ini dapat terselesaikan dengan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, kepada ayah tercinta Alias Taufik Helmi Nasution sosok dan ibunda tercinta Mariana Rambe yang selalu memberikan support serta selalu mendoakan penulis sehingga bisa di tahap ini, tidak lupa kepada saudara/i saya yaitu Abangda tercinta Raman Nuzul Nasution, SP, kakak tersayang Sri Wahyuni Nasution, SE, adik-adik kakak tersayang Zahya Alya Nasution dan Natasya Adrena Saila Nasution yang selalu menjadi penyemangat penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua orang yang telah membantu dalam menulis dan menyelesaikan skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Assoc.Prof.Dr. Siti Hajar S.Sos., M,SP Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
8. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan.
9. Kepada Seluruh Staf Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang membantu administrasi dan informasi.
10. Kepala Dinas Sosial yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Dinas tersebut.
11. Bapak Trisno M Hutagalung,SH yang telah bersedia membantu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian.
12. Kepada teman-teman mahasiswa Ilmu Administrasi Publik stambuk 2020 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih selalu berbagi informasi selama berjalan masa perkuliahan serta support satu sama lain.
13. Sahabat penulis di bangku perkuliahan yang selalu kebersamai dalam empat tahun ini, yaitu Junika Rossi dan Indri Maudina yang banyak membantu penulis dalam mengerjakan skripsi dan selalu setia menemani penulis pada saat pengerjaan skripsi.

14. Heri Perdana Putra Tanjung yang tak kalah penting kehadirannya.

Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, selalu menjadi support sistem terbaik, dan mendengarkan keluh kesah serta menjadi salah satu alasan penulis tetap semangat dalam menjalani proses penyusunan skripsi ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.

15. Dan terakhir untuk diri sendiri Listi Rimayani, terimakasih banyak sudah bertahan sejauh ini, terimakasih banyak untuk pengorbanan yang telah dilakukan, bukan hal yang mudah agar bisa berada di titik ini, kamu hebat dan pantas mendapatkan apresiasi.

Akhir kata Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas sebagai amal kebaikan, serta tidak lupa penulis juga memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini. Penulis menyadari apa yang terkandung dan tertuang dalam skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna baik dari segi teknis maupun materinya. Seiring dengan hal itu, saran dan nasehat yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga akan lebih baik lagi untuk kedepannya, dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya. Amin Yarabba Allamin.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>10</b>
2.1 Koordonasi .....	10
2.1.1 Pengertian Koordinasi .....	10
2.1.2 Ciri-ciri Koordinasi.....	11
2.1.3 Jenis-Jenis Koordinasi .....	13
2.1.4 Konsep Fungsi Koordinasi Diagonal.....	14
2.2 Dinas Sosial .....	19
2.2.1 DefinisiDinas Sosial .....	19
2.2.2 Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial .....	19
2.3 Gelandang Dan Pengemis.....	21
2.3.1 DefinisiGelandang Dan Pengemis.....	21
2.3.2 Ciri-Ciri Gelandang Dan Pengemis .....	22
2.3.3 Faktor Penyebab Gelandang Dan Pengemis.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	24
3.2 Kerangka Konsep .....	24
3.3 DefinisiKonsep .....	26
3.4 Kategorisasi Penelitian .....	26
3.5 Informan atau Narasumber .....	27
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.7 Teknik Analisis Data.....	28
3.8 Waktu Penelitian Dan Lokasi Penelitian .....	31
3.9 Deskripsi Singkat Objek Penelitian.....	31
3.9.1 Dinas Sosial Kota Medan .....	31
3.9.2 Visi dan Misi.....	31
3.9.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	32
3.9.4 Struktur Organisasi Dinas Sosial .....	33



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Gelandang Dan Pengemis Yang Mendapat Pelayanan Dibidang Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Pada Tahun 2023 .....	4
---	---

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep .....	25
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial.....	33

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Dokumentasi di Dinas Sosial Kota Medan .....	56
Lampiran II	SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi .....	57
Lampiran III	SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi Dan Pembimbing .....	58
Lampiran IV	SK-3 Permohonan Seminar Proposal .....	59
Lampiran V	Surat Pernyataan Telah Mengajukan Permohonan Ujian Skripsi ..	60
Lampiran VI	SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi .....	61
Lampiran VII	Pedoman Wawancara .....	62
Lampiran VIII	Surat Permohonan Izin Penelitian .....	63
Lampiran IX	Surat Keterangan Izin Penelitian .....	64
Lampiran X	Surat Keterangan Selesai Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Lampiran XI	SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Lampiran XII	Surat Keterangan Bebas Pustaka.....	65
Lampiran XIII	Surat LoA JAPK .....	66
Lampiran XIV	Daftar Riwayat Hidup.....	67

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Masalah gelandangan dan pengemis merupakan salah satu tantangan sosial yang kompleks di banyak kota di seluruh dunia, termasuk di Kota Medan, Indonesia. Dimana, Kota Medan sebagai kota besar ketiga di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keberadaan gelandangan dan pengemis yang memiliki populasi gelandangan dan pengemis yang signifikan. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan, tetapi juga menyoroiti kegagalan sistem sosial dalam melindungi dan mengatasi ketidakmampuan individu yang rentan. Penyebab meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis di kota ini meliputi faktor-faktor seperti kemiskinan, migrasi penduduk, konflik sosial, serta kurangnya kesempatan kerja yang layak. Dampak sosial dan ekonomi dari keberadaan mereka meliputi peningkatan angka kriminalitas, penyalahgunaan zat-zat terlarang, penyebaran penyakit menular, serta gangguan terhadap ketertiban umum dan citra kota.

Penyebab dari semua itu adalah jumlah pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai dan kesempatan kerja yang tidak selalu sama dan faktor urbanisasi dengan maksud untuk merubah nasib, tapi sayangnya, mereka tidak membekali diri dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai, sehingga keadaan ini menambah tenaga kerja yang tidak produktif di Kota Medan. Permasalahan ini juga didukung oleh data persebaran penduduk Kota

Medan, yaitu persebaran penduduk yang tidak didukung oleh lingkungan dan pembangunan akan menimbulkan masalah sosial yang kompleks, dimana penduduk menjadi beban bagi lingkungan maupun sebaliknya. Pada tahun 2022, penduduk Kota Medan mencapai 2.494.512 jiwa dibanding jumlah penduduk pada tahun 2021, terjadi penambahan penduduk sebesar 33.654 jiwa (1,35%) dengan luas wilayah mencapai 265.10 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk mencapai 9.410 jiwa/km<sup>2</sup>.

Mobilitas dan persebaran penduduk yang optimal, berdasarkan pada adanya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, namun di Kota Medan mobilitas ini tidak stabil sehingga menciptakan masalah sosial yang cukup kompleks yaitu gelandangan dan pengemis. Selanjutnya, masalah sosial yang umumnya berakar dari persoalan ekonomi itu, kini menjadi problem hukum. Kebijakan penanganan kelompok masyarakat Gepeng itupun selalu menuai pro-kontra, melarang orang mengemis dan menghukum warga yang coba bersedekah dianggap bukan solusi. Tetapi ada yang setuju karena percaya mampu mengurangi pengemis manakala orang takut mengasihani kelompok yang kerap disebut pemalas itu. Para gepeng dapat ditemui dipertigaan, perempatan, lampu merah, dan tempat umum, bahkan dikawasan pemukiman. Sebagian besar dari mereka menjadikan mengemis sebagai profesi. Hal ini tentu sangat mengganggu pemandangan dan meresahkan masyarakat.

Keberadaan gepeng di perkotaan Kota Medan sangat meresahkan masyarakat, selain mengganggu aktifitas masyarakat di jalan raya, mereka juga merusak keindahan kota, dan tidak sedikit kasus kriminal yang dilakukan oleh mereka, seperti mencopet, mencuri dan sebagainya. Secara formal pemerintah Kota

Medan telah mengambil sikap yang jelas terhadap masalah sosial gepeng. Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis serta Praktik Susila, Pasal 2 disebutkan bahwa dilarang melakukan penggelandangan dan pengemisan berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun dengan mempengaruhi/ menimbulkan belas kasihan orang lain, dilarang dengan sengaja menjerat orang lain seperti bayi, anak kecil, dan mendatangkan seseorang/ beberapa orang untuk maksud melakukan pengemisan. Dalam hal ini kinerja dari Dinas Sosial Kota Medan sangat penting untuk menekan jumlah gepeng di Kota Medan dengan melakukan pengendalian dan pelayanan rehabilitasi Gelandang dan Pengemis yang perlu di optimalkan.

Dinas Sosial memiliki peran sentral dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis. Tugas utamanya meliputi identifikasi, intervensi, dan rehabilitasi individu yang membutuhkan bantuan. Namun, untuk mengatasi tantangan yang kompleks ini, diperlukan pendekatan yang terkoordinasi dan terintegrasi dengan berbagai pihak terkait.

Dinas Sosial Kota Medan sebagai pusat kegiatan pelayanan sosial seharusnya bukan hanya melakukan pendataan terhadap gepeng yang terjaring razia lalu melepaskannya kembali tetapi memberikan pelayanan sosial berupa pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tidur, pelayanan juga diberikan dalam bentuk pembinaan keterampilan yang bertujuan mengembangkan minat bakat yang dapat digunakan dalam membantu diri, lingkungan dan keluarganya. Rehabilitasi sosial yang dapat dilakukan meliputi pembinaan fisik, mental, mengubah sikap dan tingkah laku dan rasiolisasi, serta pembinaan lanjut bagi masalah Gepeng agar

mampu berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Serta melakukan pengawasan secara bertahap terhadap gepeng yang telah mendapatkan pembinaan. Agar tidak kembali lagi menggelandang dan mengemis di jalanan.

**Tabel 1.1**  
**Data Gelandang Dan Pengemis Yang Mendapat Pelayanan Dibidang**  
**Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Pada Tahun 2023**

<b>Nomor</b>	<b>PPKS</b>	<b>Jumlah yang telah di rehabilitasi</b>
1.	Pengemis	426 orang
2.	Pengamen	14 orang
3.	Badut	17 orang
4.	Kemoceng	2 orang
5.	Manusia silver	11 orang
6.	Manusia Robot	2 orang
7.	Penjual tissue	3 orang

Sumber : Dinas Sosial Kota Medan.

Berdasarkan tabel di atas jumlah Gelandang dan Pengemis yang telah direhabilitasi sosial pada tahun 2023 adalah 475 orang, jika dibandingkan dengan jumlah Gelandang dan Pengemis yang di rehabilitasi sosial pada tahun 2017 adalah 184 orang, maka dapat disimpulkan terjadi peningkatan yang sangat signifikan sehingga perlu perhatian dari pemerintah kota setempat. Maka, Dinas Sosial memiliki peran sentral dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis. Tugas utamanya meliputi identifikasi, intervensi, dan rehabilitasi individu yang membutuhkan bantuan. Namun, untuk mengatasi tantangan yang kompleks ini, diperlukan pendekatan yang terkoordinasi dan terintegrasi dengan berbagai pihak terkait.

Prosedur pengendalian dan pelayanan rehabilitasi Gelandang dan Pengemis dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait yang

tentunya memiliki wewenang yang sama dengan Dinas Sosial dalam pengendalian dan pelayanan rehabilitasi Gelandang dan Pengemis, Dinas Sosial berkoordinasi dengan Satpol PP dengan menggunakan alur dan mekanisme sebagai berikut :

1. Laporan masyarakat/RT/RW ke Dinas Sosial .
2. Dinas Sosial melakukan koordinasi dengan Satpol PP untuk permintaan tenaga lapangan.
3. Pembentukan tim lapangan Dinas Sosial dan Satpol PP.
4. Tim lapangan menindaklanjuti laporan ke lokasi.
5. Gepeng dibawa ke rumah singgah Dinas Sosial.
6. Pendataan dan assessment Gepeng.

Koordinasi diagonal merupakan konsep manajemen yang mengacu pada koordinasi lintas hierarki dan lintas departemen. Dalam konteks pelayanan sosial, koordinasi diagonal menghubungkan berbagai tingkat pemerintahan serta berbagai lembaga dan organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam memberikan layanan kepada populasi yang membutuhkan. Galbraith (1995) mendefinisikan fungsi koordinasi diagonal sebagai cara untuk menghubungkan dan mengkoordinasikan berbagai unit atau divisi dalam organisasi yang terletak pada tingkat yang berbeda dalam struktur organisasi. Kemudian, Griffin (2018) menjelaskan bahwa koordinasi diagonal adalah proses koordinasi yang terjadi antara individu atau unit yang berada pada tingkat hierarki yang berbeda dalam organisasi. Dengan demikian, fungsi koordinasi diagonal merupakan salah satu mekanisme koordinasi yang terjadi antar unit organisasi yang tidak berada dalam satu hierarki yang sama. Fungsi ini memungkinkan komunikasi dan koordinasi lintas departemen atau divisi untuk

mencapai tujuan organisasi secara efektif. Berdasarkan dari penjelasan tentang konsep fungsi Definisi fungsi koordinasi diagonal, dapat disimpulkan tentang fungsi koordinasi diagonal dalam Dinas Sosial, yaitu

1. **Kolaborasi Antarinstansi:** Koordinasi diagonal memungkinkan Dinas Sosial untuk bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Sosial, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga agama. Kolaborasi ini memperluas jangkauan pelayanan dan memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara lebih efektif.
2. **Integrasi Program:** Melalui koordinasi diagonal, program-program rehabilitasi dari berbagai sektor dapat diintegrasikan secara holistik. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi kebutuhan individu secara komprehensif dan pengembangan intervensi yang sesuai.
3. **Penyelarasan Kebijakan:** Koordinasi diagonal memfasilitasi penyelarasan kebijakan antara berbagai instansi pemerintah dan non-pemerintah yang terlibat dalam pelayanan sosial. Hal ini penting untuk memastikan bahwa upaya pengendalian dan pelayanan rehabilitasi gelandangan dan pengemis didukung oleh kerangka kebijakan yang konsisten dan terpadu.

Koordinasi diagonal dalam Dinas Sosial memiliki peran krusial dalam pengendalian dan pelayanan rehabilitasi bagi gelandangan dan pengemis di Kota Medan. Dengan kolaborasi antarinstansi, integrasi program, dan penyelarasan kebijakan, upaya untuk mengatasi masalah ini dapat dilakukan secara lebih efektif.

Namun, diperlukan komitmen dan kerja sama yang kuat dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan ini. Dengan demikian, diharapkan bahwa melalui implementasi koordinasi diagonal, Dinas Sosial dapat menjadi agen perubahan yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan melindungi hak asasi manusia bagi semua warga Kota Medan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis ingin mengambil judul penelitian **“Fungsi Koordinasi Dinas Sosial Dalam Pengendalian Dan Pelayanan Rehabilitasi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu Fungsi Koordinasi Diagonal Dinas Sosial Dalam Pengendalian Dan Pelayanan Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis Di Kota Medan.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Fungsi Koordinasi Diagonal Dinas Sosial Dalam Pengendalian Dan Pelayanan Rehabilitasi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang di hasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek teoritis, penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Fungsi Koordinasi Diagonal Dinas Sosial Dalam Pengendalian Dan Pelayanan Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis Di Kota Medan.

2. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.
3. Aspek akademis, hasil penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dilakukan secara otomatis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dapat dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II URAIAN TEORITIS**

Dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang melandasi penelitian dengan menguraikan Fungsi koordinasi diagonal dinas sosial dalam pengendalian dan pelayanan Rehabilitasi Gelandangan dan pengemis di kota Medan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, informan atau narasumber,

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian, deskripsi ringkas objek penelitian.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban narasumber-narasumber.

#### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini menguraikan simpulan dan saran.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Koordonasi**

##### **2.1.1 Pengertian Koordinasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring menjelaskan koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.

Handoko (2020:193) menuliskan, “Koordinasi (*coordination*) adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.”

Menurut Brech dalam Hasibuan (2020:85), “Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. “

Koordinasi dalam sebuah organisasi merupakan peraturan dalam arti pasif berupa membuat aturan mengenai segala gerak dan kegiatan dan kinerja antara atasan dan bawahan yang mempunyai tugas dan kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan satu sama lainnya, pengaturan mana bertujuan untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan kegiatan saling

bertindih yang dapat mengakibatkan pemborosan dan pengaruh tidak baik terhadap semangat dan tertib kerja.

Menurut Handayani (2011), setidaknya terdapat tiga fungsi penting koordinasi untuk sebuah organisasi. Fungsi koordinasi antara lain:

1. Koordinasi yang baik akan berdampak terhadap efisiensi. Koordinasi yang baik akan menghindarkan suatu organisasi menghabiskan biaya, tenaga, dan materi yang berlebihan serta output yang tetap maksimal.
2. Koordinasi berdampak terhadap moral suatu organisasi. Hal ini sangat berkaitan dengan leadership seorang pemimpin. Seorang pemimpin perlu memiliki jiwa kepemimpinan yang baik agar mampu melakukan koordinasi untuk anggotanya.
3. Koordinasi berdampak pada perkembangan personal dalam organisasi. Unsur pengendalian personal selalu ada dalam koordinasi. Maka dari itu, anggota tidak bisa dibebaskan begitu saja melainkan harus tetap dikendalikan.

### **2.1.2 Ciri-ciri Koordinasi**

Handayani (2011) mengatakan yang menjadi ciri-ciri koordinasi adalah sebagai berikut.

1. Yang pertama adalah tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Oleh karena itu, koordinasi adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab dari pimpinan. Dikatakan bahwa pimpinan yang berhasil, karena telah melakukan koordinasi dengan baik.

2. Yang kedua adalah koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Hal ini disebabkan karena kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan sebaik-baiknya. Lalu koordinasi adalah proses kerja yang terus-menerus, artinya suatu proses yang bersifat kesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.
3. Selanjutnya, adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Hal ini disebabkan koordinasi adalah konsep yang diterapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang bekerja sama di dalam kelompok untuk tujuan bersama dan didukung oleh adanya konsep kesatuan tindakan. Kesatuan tindakan adalah inti dari koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha/tindakan-tindakan dari setiap kegiatan individu yang bekerjasama sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam mencapai hasil bersama dan memiliki tujuan organisasi, yaitu tujuan bersama. (*common purpose*). Kesatuan usaha/tindakan manusia/kesadaran/pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok dimana mereka bekerja.

Dari ciri-ciri di atas, dapat disimpulkan bahwa yang merupakan ciri-ciri koordinasi adalah suatu usaha kerjasama yang dilakukan secara terus-menerus yang didukung adanya kesatuan usaha atau tindakan yang ditanggungjawab oleh pimpinan.

### 2.1.3 Jenis-Jenis Koordinasi

Menurut Sugandha (2011) beberapa jenis koordinasi sesuai dengan lingkup dan arah jalurnya yaitu menurut lingkungannya sebagai berikut :

1. Koordinasi Intern

Yaitu koordinasi antar pejabat antar unit di dalam suatu organisasi dan koordinasi ekstern, yaitu koordinasi antar pejabat dari berbagai organisasi atau antar organisasi.

2. Koordinasi horizontal

Yaitu koordinasi antar pejabat atau antar yang mempunyai tingkat hierarki yang sama dalam suatu organisasi dan antar pejabat dari organisasi-organisasi yang setingkat.

3. Koordinasi vertikal

Yaitu koordinasi antar pejabat dari unit-unit tingkat bawah oleh pejabat atasannya atau unit tingkat atasannya langsung, juga cabang-cabang suatu organisasi oleh organisasi induknya.

4. Koordinasi diagonal

Yaitu koordinasi antar pejabat atau unit yang berbeda fungsi dan berbeda tingkatan hierarkinya dan koordinasi fungsional yaitu koordinasi antar pejabat, antar unit atau antar organisasi yang didasarkan atas kesamaan fungsi, atau karena koordinatornya mempunyai fungsi tertentu.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, terdapat koordinasi

fungsional, antara dua atau lebih instansi yang mempunyai program yang berkaitan erat, koordinasi instansional, terhadap beberapa instansi yang menangani satu urusan tertentu yang bersangkutan dan koordinasi territorial, terhadap dua atau lebih wilayah dengan program tertentu.

#### **2.1.4 Konsep Fungsi Koordinasi Diagonal**

Konsep koordinasi diagonal menjadi semakin penting seiring dengan kompleksitas dan dinamika yang terjadi dalam lingkungan organisasi. Koordinasi diagonal merujuk pada hubungan dan interaksi antara unit-unit atau departemen yang berbeda dalam suatu organisasi, yang mungkin memiliki tugas dan tanggung jawab yang saling terkait, namun tidak secara langsung terhubung dalam struktur hierarkis organisasi. Dalam era di mana perubahan cepat dan kompleksitas menjadi norma, pemahaman tentang fungsi koordinasi diagonal menjadi penting untuk menjaga kinerja organisasi dan mencapai tujuan strategisnya.

Salah satu alasan utama mengapa koordinasi diagonal menjadi penting adalah karena kemajuan teknologi dan globalisasi telah mengubah lanskap bisnis secara signifikan. Organisasi sekarang seringkali harus beroperasi di lintas batas geografis, budaya, dan fungsional, yang menghasilkan kompleksitas tambahan dalam upaya koordinasi. Dalam konteks ini, koordinasi diagonal memungkinkan organisasi untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan lingkungan dan memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang tersebar secara luas di dalam organisasi.

Selain itu, koordinasi diagonal juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi inovasi dan pembelajaran organisasi. Dengan memungkinkan aliran informasi dan ide-ide antarunit yang berbeda, koordinasi diagonal menciptakan peluang untuk kolaborasi lintas-fungsi yang dapat menghasilkan solusi kreatif dan inovatif untuk masalah yang kompleks. Ini juga memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pembelajaran lintas-unit, yang merupakan kunci untuk meningkatkan adaptabilitas organisasi dalam menghadapi perubahan yang cepat. Menurut Sutarto (2015:146-147), manfaat koordinasi diagonal adalah:

1. Menghindarkan perasaan lepas antara satuan organisasi atau antara pejabat di dalam organisasi.
2. Dengan koordinasi dapat menghindari kemungkinan terjadinya pertentangan antara satuan organisasi atau antara pejabat.
3. Koordinasi dapat menghindari dari terjadinya rebutan fasilitas.
4. Menghindarkan kemungkinan terjadinya kesamaan pekerjaan atas suatu aktivitas oleh satuan organisasi atau kesamaan pengerjaan terhadap tugas para pejabat.
5. Mencegah kemungkinan terjadinya kekosongan pengerjaan terhadap tugas Para pejabat.
6. Menumbuhkan kesadaran di antara pejabat untuk saling membantu terutama di antara pejabat yang berada di dalam satuan organisasi yang sama.

7. Menumbuhkan kesadaran diantara pejabat untuk saling memberitahu permasalahan yang dihadapi bersarna sehingga dapat menghindari terjadinya keselamatan bagi dirinya atas kerugian pejabat lainnya.
8. Menjamin adanya kesamaan langkah antar pejabat.
9. Dengan adanya koordinasi dapat menjamin adanya kesamaan tindakan antar pejabat.

Sehingga dari uraian tersebut terlihat manfaat koordinasi itu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah sikap dan perilaku orang lain dengan melalui informasi atau pendapat atau pesan atau ide yang disampaikannya kepada orang tersebut untuk mencapai tujuan organisasi.

Koordinasi diagonal memiliki peran kunci dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh organisasi modern. Galbraith (1995), bahwa koordinasi diagonal diperlukan untuk mengatasi keterbatasan hierarki dalam mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi yang terlalu hierarkis cenderung menghambat aliran informasi dan koordinasi yang efektif antar bagian-bagian yang berbeda. Kemudian, konsep koordinasi diagonal yang dikembangkan oleh Ansari & Kogut (1997) yang menjelaskan koordinasi diagonal merupakan fenomena yang penting dalam konteks organisasi modern yang kompleks, dimana konsep ini merujuk pada hubungan dan interaksi antara unit atau bagian-bagian yang berbeda dalam suatu organisasi yang mungkin tidak secara langsung terhubung dalam struktur hierarkisnya. Sejalan dengan pemikiran keduanya, Griffin (2018) juga menjelaskan bahwa

koordinasi diagonal mencakup interaksi dan kolaborasi antara unit-unit yang tidak secara langsung terhubung dalam struktur organisasi hierarkis, dan ini terjadi ketika individu atau kelompok dari unit yang berbeda bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama atau menyelesaikan tugas yang saling terkait. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi koordinasi diagonal adalah sebuah konsep dalam ilmu organisasi yang merujuk pada hubungan dan interaksi antara unit-unit atau bagian-bagian yang berbeda dalam suatu organisasi.

Fungsi koordinasi diagonal adalah sebuah konsep yang merujuk pada interaksi antara dua atau lebih komponen dalam sebuah sistem yang tidak langsung terhubung secara langsung tetapi terkoordinasi melalui elemen ketiga. Koordinasi diagonal sering kali terjadi di antara unit atau departemen yang berbeda, yang mungkin memiliki tugas dan tanggung jawab yang saling terkait, namun tidak secara langsung terhubung dalam struktur hierarkis organisasi. Dalam beberapa situasi, koordinasi diagonal dapat menjadi kunci untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Secara umum, fungsi koordinasi diagonal memiliki peran yang semakin penting dalam menjaga kinerja organisasi dalam lingkungan yang semakin kompleks dan dinamis. Dengan memfasilitasi kolaborasi lintas-unit, aliran informasi, dan pembelajaran organisasi, koordinasi diagonal membantu organisasi untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan lingkungan dan mengatasi tantangan yang muncul. Namun, mengelola koordinasi diagonal juga dapat menimbulkan sejumlah tantangan, termasuk risiko konflik,

ambiguitas peran, dan tantangan teknis. Dengan pemahaman yang baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi diagonal dan strategi untuk mengelolanya, organisasi dapat memanfaatkan potensi penuh dari fungsi ini untuk mencapai tujuan strategisnya. Griffin (2018) menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas dan frekuensi koordinasi diagonal dalam organisasi, yaitu :

1. Kepemimpinan yang mendukung kolaborasi lintas departemen dan mendorong budaya kerja yang terbuka dapat memfasilitasi koordinasi diagonal. Pemimpin yang mempromosikan komunikasi dan kerjasama lintas-fungsi cenderung menciptakan lingkungan yang mendukung interaksi diagonal.
2. Struktur organisasi yang terbuka dan fleksibel memudahkan terjadinya koordinasi diagonal. Organisasi dengan batas-batas yang kurang kaku antara departemen dan unit cenderung mendorong kolaborasi lintas-fungsi.
3. Budaya organisasi yang mendukung kolaborasi, pembelajaran, dan inovasi juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi koordinasi diagonal. Organisasi yang mendorong berbagi pengetahuan, eksperimen, dan risiko cenderung memiliki tingkat koordinasi diagonal yang lebih tinggi.
4. Penggunaan teknologi informasi dapat memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi lintas-fungsi. Sistem informasi yang terintegrasi dan

platform kolaborasi online dapat mempermudah pertukaran informasi dan koordinasi antara unit-unit yang berbeda.

Koordinasi diagonal merupakan aspek penting dalam manajemen organisasi yang kompleks. Melalui interaksi antara unit-unit yang berbeda, organisasi dapat meningkatkan keterhubungan, inovasi, dan fleksibilitas. Faktor-faktor seperti kepemimpinan, struktur organisasi, budaya organisasi, dan teknologi informasi memainkan peran penting dalam memengaruhi koordinasi diagonal. Dengan memahami pentingnya koordinasi diagonal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, manajer dan pemimpin organisasi dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi lintas-fungsi dan memperkuat kinerja organisasi secara keseluruhan.

## **2.2 Dinas Sosial**

### **2.2.1 Definisi Dinas Sosial**

Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok dan masyarakat.

### **2.2.2 Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial**

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang perumusan, kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan

sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Perda Kota Medan No 6 Tahun 2003 Pasal 2 Ayat 1 menjelaskan bahwasannya dilarang melakukan kegiatan mengemis. Dinas Sosial sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang Sosial wajib melakukan upaya kepada pengemis untuk mengembalikan fungsi sosial mereka salah satu upaya yang dilakukan Dinas Sosial adalah dengan melakukan rehabilitasi, namun masih banyak pengemis yang berkekoran di jalanan, hal ini menandakan adanya Suatu kendala sehingga Dinas Sosial belum optimal dalam melakukan program rehabilitasi kepada pengemis.

Berdasarkan Permensos No 16 Tahun 2019 Tentang Standart Rehabilitasi Dinas Sosial dapat melakukan rehabilitasi sosial dasar di dalam rumah singgah sebagai bentuk pelayanan rehabilitasi sosial dasar, tujuan dilakukannya rehabilitasi oleh Dinas Sosial Kota Medan adalah memulihkan kembali fungsi sosial individu pengemis agar dapat menjalankan hidup layaknya masyarakat pada umumnya hal ini selaras

dengan tujuan negara Republik Indonesia dalam Alinea Ke IV yaitu memajukan Kesejahteraan umum, kendala yang di alami oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam merehabilitasi pengemis lebih condong ke faktor internal dan upaya yang dilakukannya oleh Dinas Sosial untuk mengatasi kendala yang dialami dengan menerapkan kebijakan dan menjalin kerja sama dengan instansi lain agar dapat terlaksananya program rehabilitasi.

## **2.3 Gelandang Dan Pengemis**

### **2.3.1 Definisi Gelandang Dan Pengemis**

Menurut PP No. 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam ketidaksesuaian dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta hidup mengembara ditempat umum. Sedangkan Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Menurut Ali dalam Nur (2022) menyatakan bahwa gelandangan berasal dari gelandang yang berarti selalu mengembara, atau berkelana (lelana). Mengutip pendapat Wirosardjono dalam Fadri (2019) juga menyatakan bahwa gelandangan merupakan lapisan sosial, ekonomi dan budaya paling bawah dalam stratifikasi masyarakat kota.

Pandangan ini mengisyaratkan bahwa Gependang, dianggap sulit memberikan sumbangsih yang berarti terhadap pembangunan kota karena mengganggu keharmonisan, keberlanjutan, penampilan, dan konstruksi

masyarakat kota. Berarti dalam hal ini gepeng tidak hanya menghadapi dalam kesulitan hidup seperti ekonomi akan tetapi juga dalam konteks hubungan sosial dalam masyarakat kota.

### **2.3.2 Ciri-Ciri Gelandang Dan Pengemis**

Ciri-ciri dari gelandangan dan pengemis sebagai berikut:

1. Tidak memiliki tempat tinggal

Kebanyakan dari gepeng dan pengemis ini tidak memiliki tempat hunian atau tempat tinggal. Mereka bisa mengembara di tempat umum, tidak memiliki tempat tinggal yang layak huni, seperti di bawah kolong jembatan, rel kereta api, gubuk liar di sepanjang sungai, emper toko dan lain-lain.

2. Hidup di bawah garis kemiskinan.

Para gepeng tidak memiliki penghasilan tetap yang bisa menjamin untuk kehidupan mereka ke depan.

3. Hidup dengan penuh ketidak pastian

Para gepeng hidup mengelandang dan mengemis di setiap harinya. Kondisi ini sangat memperhatikan karena jika mereka sakit mereka tidak bisa mendapatkan jaminan sosial seperti yang dimiliki oleh pegawai negeri yaitu ASKES untuk berobat dan lain-lain.

4. Memakai baju yang compang camping

Gepeng biasanya tidak pernah menggunakan baju yang rapi atau berdasi melainkan baju yang kumal dan dekil.

5. Tidak memiliki pekerjaan tetap yang layak, seperti pencari rongsokan, penarik grobak.
6. Tuna etika, dalam arti saling tukar-menukar istri atau suami, kumpul kebo atau komersialisasi istri dan lain-lainnya.
7. Meminta minta dimuka umum, seperti terminal bus, stasiun kereta api, di rumah-rumah atau ditoko-toko.
8. Meminta-minta dengan cara berpura pura atau sedikit memaksa, disertai dengan tutur kata yang manis dan iba.

### **2.3.3 Faktor Penyebab Gelandang Dan Pengemis**

Permasalahan gelandangan dan pengemis di kota Medan tidak hanya di sebabkan oleh kemiskinan tetapi faktor-faktor penyebab terjadinya gelandangan dan pengemis menurut Suparlan yang dipaparkan pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh yaitu (dinsos, 2022):

1. Lajunya pertumbuhan penduduk di perdesaan.
2. Kondisi daerah perdesaan.
3. Kondisi lapangan kerja.
4. Warisan hidup menggelandang; dan
5. Faktor alam atau musibah/ bencana.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

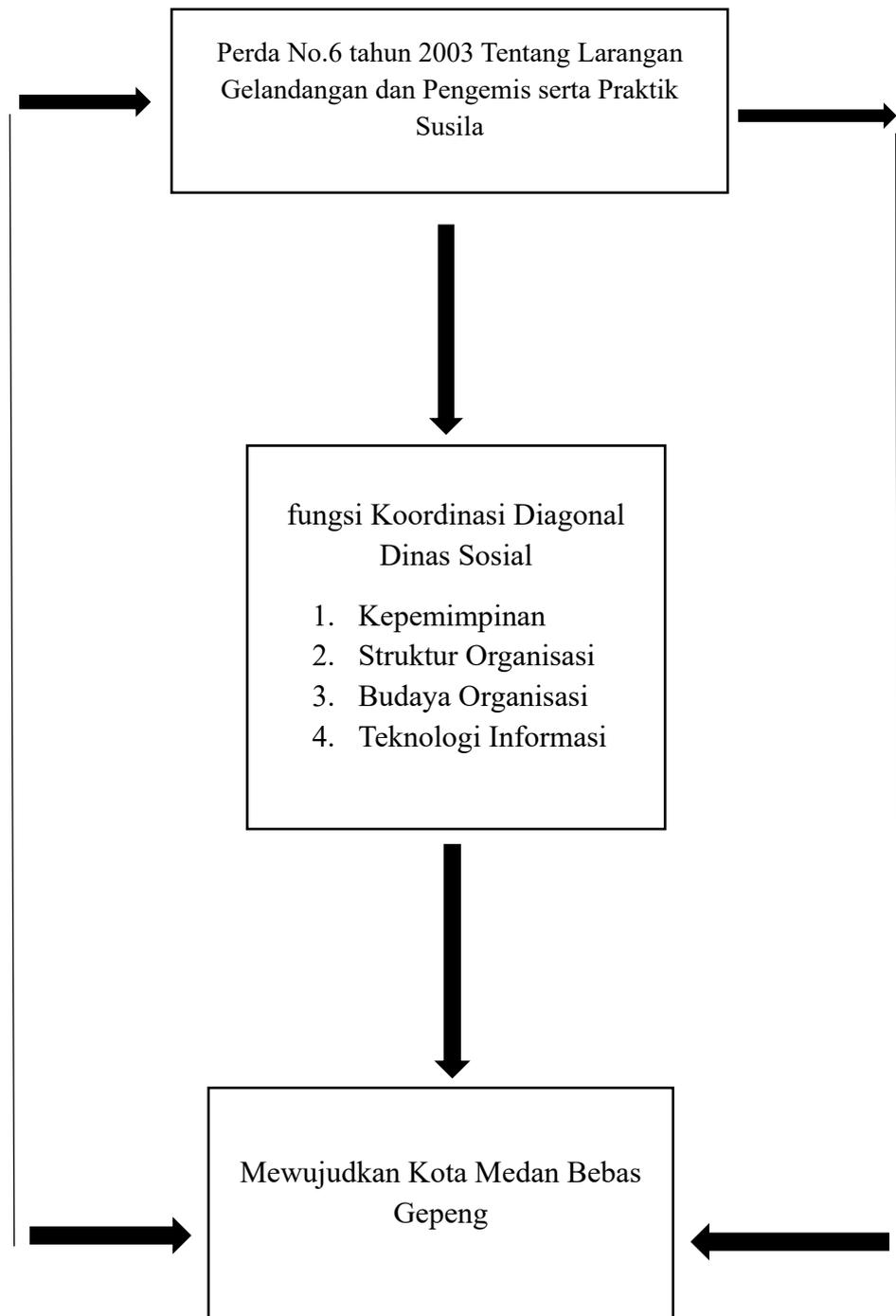
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang mempunyai karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data langsung yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka namun data tersebut berasal naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen lainnya.

Creswell (2016:3) menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan rencana dan prosedur penelitian yang meliputi langkah-langkah berupa dari asumsi-asumsi luas hingga metode-metode terperinci dalam pengumpulan, analisis dan interpretasi data.

Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial.

#### **3.2 Kerangka Konsep**

Kerangka konsep yang akan di deskripsikan dan digambarkan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Fungsi Koordinasi Diagonal Dinas Sosial Dalam Pengendalian Dan Pelayanan Rehabilitasi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan. Maka kerangka konsep digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 3.1 Kerangka Konsep**

### 3.3 Definisi Konsep

Aristoteles dalam "*The classical theory of concepts*" menyatakan, konsep adalah penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Dalam penelitian ini yang menjadi Definisi konsep adalah:

1. Fungsi koordinasi yaitu untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang efektif dan efisien. Istilah koordinasi ini mungkin biasa kita temukan dalam aktivitas yang melibatkan banyak orang atau bekerja secara kolektif dalam kelompok. Ini karena sebuah organisasi harus memiliki koordinasi yang baik.
2. Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok dan masyarakat.
3. Gelandang dan Pengemis adalah seorang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Gepeng (gelandangan dan pengemis) adalah seorang yang hidup mengelandang dan sekaligus mengemis.

### 3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian tersebut. Adapun kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

1. Tahapan dalam pengendalian dan pelayanan rehabilitasi gelandang dan pengemis.
2. Ketepatan waktu dalam proses rehabilitasi gelandang dan pengemis oleh dinas sosial.
3. Kerja sama antar unit di dinas sosial dalam pengendalian dan pelayanan rehabilitasi gelandang dan pengemis.
4. Sarana dan prasarana yang di sediakan oleh pemerintah dalam menunjang proses rehabilitasi gelandang dan pengemis.

### **3.5 Informan atau Narasumber**

Untuk melengkapi data-data yang akan di analisis secara kualitatif maka dalam penelitian ini menggunakan informan dan narasumber sebagai berikut :

1. Bapak Trisno M Hutagalung,SH (selaku seksi rehabilitasi sosial)
2. Ibu Tuti Diana,SH (selaku seksi rehabilitasi sosial)
3. Ibu Nuraini (Selaku Gepeng)

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau di lapangan yang merupakan data empirik, data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang

dibutuhkan dan relevan dengan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen atau arsip, dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam Penelitian.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan dan mengukur informasi tentang variabel yang ditargetkan dalam sistem yang mapan, yang kemudian memungkinkan seseorang untuk menjawab pertanyaan yang relevan dan mengevaluasi hasilnya (Hayati, 2019). Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang utama adalah observasi partisipatif dan wawancara mendalam, ditambah kajian dokumen, yang bertujuan tidak hanya untuk menggali data, tetapi juga untuk mengungkap makna yang terkandung dalam latar penelitian.

#### 2. Reduksi Data

Reduksi Data, Reduksi data diartikan sebagai proses. Pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di

lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data, berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.

Sebenarnya bahkan sebelum data benar-benar terkumpul, antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (acapkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo). Reduksi data/proses-transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

### 3. Penyajian Data

Miles dan Huberman membatasi suatu “penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. BÉraneka penyajian yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari alat pengukur bensin, surat kabar, sampai layar komputer. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh mengalalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dan penyajian-penyajian tersebut

Dalam pelaksanaan penelitian Miles dan Huberman yakin bahwa penyajian- penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian-penyajian yang diamksud meliputi

berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

#### 4. Menarik Kesimpulan/ Verifikasi

Kegiatan analisis selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan. Penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Peneliti yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, namun dengan meminjam istilah klasik dari Glaser & Strauss (1967) kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan kumpulan catatan lapangan. Pengkodean nya ,penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana, tetapi seringkali kesimpulan itu telah dirumuskan sebelumnya sejak awal, sekalipun seorang peneliti menyatakan telah melanjutkannya secara induktif.

### **3.8 Waktu Penelitian Dan Lokasi Penelitian**

Adapun waktu dan lokasi penelitian ini adalah february 2024 – maret 2024 di Dinas Sosial Kota Medan Jl. Pinang Baris No.114, Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20127.

### **3.9 Deskripsi Singkat Objek Penelitian**

#### **3.9.1 Dinas Sosial Kota Medan**

Dinas Sosial Kota Medan Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Wali Kota Medan melalui Sekretaris Daerah Kota Medan dengan tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah di Bidang Sosial. Kantor Dinas Sosial Kota Medan beralamat di Jalan Pinang Baris/Jalan T.B Simatupang (belakang Terminal Pinang Baris No.114 B Medan).

#### **3.9.2 Visi dan Misi**

**Visi :**

KOTA MEDAN MENUJU KOTA SEJAHTERA YANG  
BERKEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH MASYARAKAT

**Misi:**

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan perlindungan dan jaminan social.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pekerja social.

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan.
4. Mengembangkan system informasi penanganan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial berbasis IT.
5. Pembangunan kompetensi SDM bagi potensi sumber kesejahteraan Sosial (PSKS).

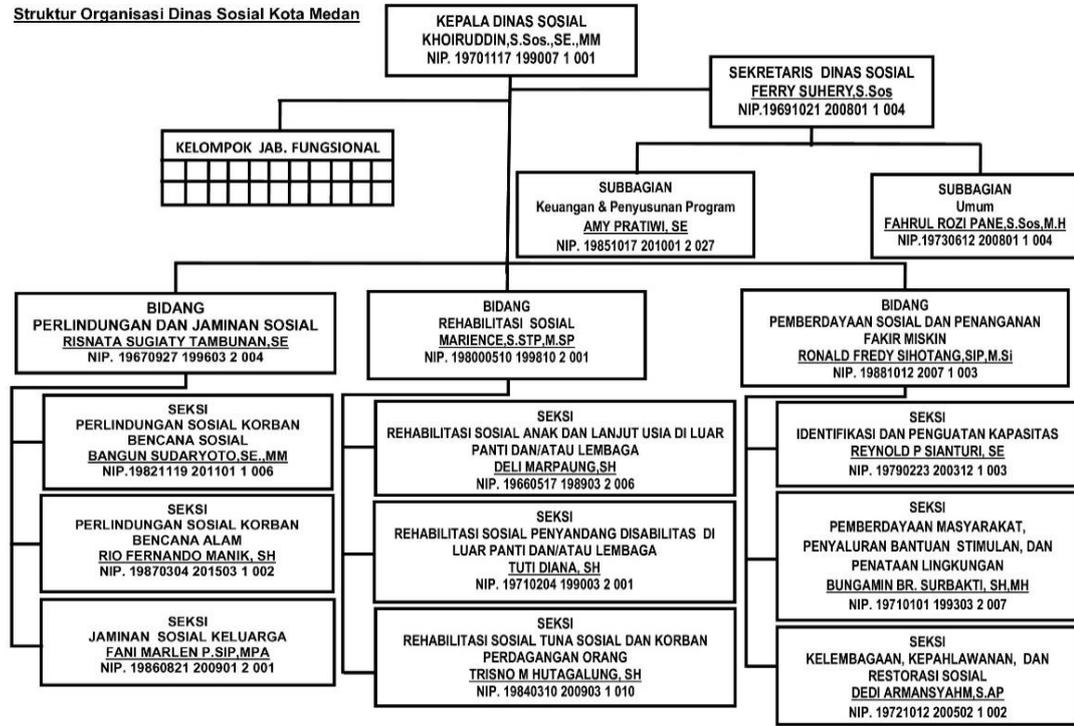
### **3.9.3 Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;
4. Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3.9.4 Struktur Organisasi Dinas Sosial



**Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial**

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi**

###### **4.1.1.1 Adanya Tahapan dalam Pengendalian dan Pelayanan Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis**

1. Tahapan koordinasi yang dilakukan untuk pelayanan Rehabilitasi Sosial. Setelah kita melakukan penertipan dan hasil tangkapan kita lakukan Scan Iris Mata di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, untuk mengetahui Identitas hasil Penertipan. Setelah itu kita lakukan pendataan dan Asesmen di Rumah Singgah oleh Tim. Setelah kita lakukan Asesmen dengan PPKS kita mempelajari dan menganalisa hasil Asesmen yang sudah di lakukan oleh Pendamping Sosial, dari hasil asesmen itulah kita bisa melakukan tahapan identifikasi dan Rujukan,yaitu sebagai berikut:

- a. PPKS yang sudah di tangkap Dinas Sosial Kota Medan berkoordinasi dengan Pihak Kecamatan/Kelurahan sesuai dengan hasil Scan iris mata
- b. PPKS yang tidak ditemukan Keluarganya dan tidak ada tempat tinggalnya kita kirim ke UPT Layanan Sosial Gelandangan Pengemis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, dan sebelumnya itu dilakukan dulu Koordinasi dengan pihak UPT

- c. Selama menjalani Pemeriksaan Identitas Kependudukan dan Asesmen terhadap PPKS, PPKS di Rumahkan dulu ditempat Penampungan sementara yaitu Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Medan.
2. Kendala yang di hadapi oleh Dinas Sosial pada saat proses pelayanan Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis.
  - a. Kendala yang dihadapi adalah masalah tempat penampungan di UPT yang dibatasi karena kepenuhan.
  - b. Mengenai Identitas PPKS yang tidak ada sehingga membuat sulit untuk penanganan rujukan ke UPT misalnya UPT Lansia.
3. Setelah kita lakukan Rujukan ke Rehabilitasi Sosial ke tempat Layanan Gelandangan Pengemis dan Layanan Lansia kita tidak ada kewenangan lagi terhadap PPKS karena kita sudah menyerahkan ke Pihak UPT secara resmi dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima.

Terkait dengan gelandangan dan Pengemis yang terlepas dari Rehabilitasi, kita juga sudah berkoordinasi dengan Pihak Layanan bahwasanya disatu sisi kurangnya SDM-nya dan kurangnya pengamanan disebabkan Lokasi Penampungan yang ada di Layanan Gelandangan Pengemis belum memadai, maksudnya dari segi Lokasi atau tempat kurang perawatan dimana pada tembok pengamanan masih terbuka, maka dari itu terkadang PPKS yang sudah kita kirim ke Layanan bisa juga sudah kita jumpai lagi dilapangan diwaktu Tim melakukan Giat Patroli PPKS.

#### **4.1.1.2 Adanya Ketetapan waktu dalam Proses Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kota Medan**

1. Pelayanan yang diberikan kepada PPKS sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial pada 5 Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami disfungsi sosial meliputi, Anak Jalanan sudah termasuk Gelandangan dan Pengemis, Bab II Rehabilitasi Sosial Dasar Bagian Kesatu Umum pasal 8 ayat (1) dan (2) pasal 9 ayat (1) Rehabilitasi Sosial Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) diberikan kepada Anak Terlantar, Gelandang dan Pengemis, pada pasal 13 Pemberian layanan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti sosial dilakukan pada Rumah Singgah atau nama lain dan atau pusat kesejahteraan sosial. Dan pada pasal 17 layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf e meliputi permukiman diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dia/PPKS berada di dalam rumah singgah.
2. Setelah selama menjalani Asesmen dan melakukan Reunifikasi 3 Hari Kerja kita melakukan Koordinasi ke Pihak Kelurahan dan Kecamatan untuk mencari keluarga PPKS yang ada Identitasnya, dan jika PPKS mempunyai keluarga kita melakukan Pemulangan melalui Kelurahan atau Kecamatan yang dihadirkan langsung keluarganya, dan sebaliknya keluarga yang tidak ada sama sekali tetapi domisili Medan kita mengirimkan ke UPT Layanan Rehabilitasi Gelandangan Pengemis yang

ada di Kota Binjai dikarenakan PPKS yang bersangkutan sudah termasuk Gelandangan yang tidak ada Rumah dan Keluarga.

3. Dinas Sosial Kota Medan selalu berkoordinasi dengan Satpol PP jika dibutuhkan dalam razia gabungan PPKS di Wilayah Kota Medan.

#### **4.1.1.3 Adanya Kerja sama antar unit di Dinas Sosial Kota Medan dalam Pengendalian dan Pelayanan Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kota Medan**

1. Setiap melaksanakan Penertipan PPKS di Wilayah Kon Molan kita selalu berkoordinasi dengan UPT Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara seperti Rehabilitas Layanan Geladangan Pengemis dan Rehabilitasi Layanan Lansia untuk menyampaikan hasil penangkapan yang dilakukan Dinas Soual Kota Medan.
2. Kendala yang kami hadapi dalam melaksanakan Koondinau dengan Layanan Rehabilitasi adalah Kebutuhan Sandangnya untuk digunakan di layanan Rehabilitasi mengingat kebutuhan dilayanan terbasa, untuk koordinasi layanan Rehabilitas Sosial Lanssa harus berpedoman dengan SOP yang diberikan, terutama harus ada Identitas sebagai sayarat utama, dan juga kebutuhan Sandangnya.
3. Kerjasama selama ini dilakukan dengan Dinas Sosial Kota Medan dengan UPT Layanan Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis cukup baik dan koordinasi begitu bagus dan dapat memaksimalkan kinerja dalam melaksanakan tugas dalam penertipan Gelandangan dan Pengemis.

#### **4.1.1.4 Adanya Sarana dan Prasarana yang disediakan oleh Pemerintah dalam menunjang Pelayanan Rehabilitasi Gelandangan Pengemis**

1. Untuk sarana yang disediakan oleh Pemerintah Kota Medan dalam hal ini Dinas Sosial Kota Medan adalah Rumah Singgah sementara, dimana didalam rumah singgah itu akan diberikan kebutuhannya layaknya kita manusia seperti diberikan makanan dan minuman selama PPKS berada di Rumah Singgah, tempat tidur yang memadai.
2. Saat ini Rumah Singgah kita masih minim berada di Perkomplekan Perumahan Warga sementara, dan ini belum memadai dengan lokasinya yang berbaur dengan warga/Komplek. Dan saat ini juga Pemerintah Kota Medan Dinas Sosial Kota Medan sudah mempunyai Rumah Perlindungan Sosial tetapi belum diresmikan dan belum diserahkan untuk difungsikan, mengingat masih ada perbaikan- perbaikan yang harus dikerjakan sebelum diserahkan ke Dinas Sosial Kota Medan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis fungsi koordinasi diagonal dinas sosial dalam pengendalian dan pelayanan rehabilitasi gelandang dan pengemis di Kota Medan belum terlaksana secara maksimal dikarenakan banyak faktor internal maupun eksternal. Sama halnya dengan kondisi dilapangkan dari beberapa narasumber gepeng yang telah penulis wawancara pada tanggal 22 Juli 2024 ibu Nuraini menyatakan bahwa Koordinasi Diagonal Dinas Sosial dalam Pengendalian dan Pelayanan Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis di kota Medan belum terealisasi

dengan baik sehingga para pegawai belum merasakan dampak positif dari koordinasi yang dilakukan Dinas Sosial.

## **4.2 Pembahasan**

Tahapan merupakan proses yang diterapkan dari suatu pekerjaan agar hasil pekerjaan tersebut dapat menggambarkan praktik-praktik baik yang digunakan. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan perlu adanya proses yang tepat agar setiap pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Handayani (2011), proses terdiri dari serangkaian tahapan kegiatan mulai dari penetapan tujuan hingga pencapaian tujuan. Terkait dengan penelitian ini yang menjadi rujukannya, penulis ingin membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu :

1. Safana Andang Hertanto, 2016. Dengan judul Penanganan Anak Jalan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang. Tujuan penelitian adalah (1) mendeskripsikan penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang; dan (2) menganalisis faktor-faktor yang menghambat penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang. Hasil dari Penelitian ini adalah Masih tingginya angka anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Semarang menunjukkan perlunya peningkatan kinerja Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, Pemuda, dan Olahraga Kota Semarang, yang dalam hal ini

berwenang menangani masalah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Kinerja bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinsospora Kota Semarang dalam penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Semarang sangat penting dalam mendukung keberhasilan terwujudnya kesejahteraan sosial di masyarakat, khususnya di Kota Semarang.

2. Putri (2021). Dengan judul Analisis Program Pembinaan Gelandang dan Pengemis (Gepeng) Pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Tujuan Penelitian ini adalah (1). Untuk mengetahui program pembinaan gelandangan dan pengemis pada Dinas Sosial di Kota Pdekanbaru? (2). Untuk mengetahui bagaimana hambatan-hambatan pada program pembinaan gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kota Pekanbaru? Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru akan tetapi pembinaan yang dilakukan tersebut terlihat masih kurang maksimal dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru maupun Satuan Polisi Pamong Praja, baik itu dalam penyuluhan, penindakan maupun dalam pembinaan karena masih ada masyarakat Kota Pekanbaru yang belum mendapatkan informasi terkait penyuluhan atau sosialisasi larangan untuk memberikan sumbangan kepada gelandagngan dan pengemis.
3. Hasan (2021). Dengan judul Peranan Dinas Sosial dalam Membina Pengemis dan Gelandang di Kota Pekanbaru. (1). Untuk mengetahui dan

menganalisis Peranan Dinas Sosial dalam Membina Pengemis dan Gelandangan di Kota Pekanbaru (2). Untuk mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi pembinaan pengemis dan gelandangan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Permasalahan kesejahteraan sosial mengenai pengemis dan gelandangan ini sering terjadi perkotaan besar, seperti Pekanbaru yang mana dari data yang di dapatkan semakin tahun angka tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis semakin meningkat baik lokal maupun pendatang. Maka dari itu pemerintah daerah Kota Pekanbaru khususnya Dinas Sosial yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penanganan masalah sosial di Kota Pekanbaru sebagai tindakan preventif mencegah dengan melakukan sosialisasi baik kepada masyarakat dan kepada gelandangan dan pengemis dan responsif dengan melakukan penertiban pemulangan kedaerah asal serta melakukan pembinaan baik fisik, mental, kesehatan dan juga kemampuan eka untuk mencapai hidup yang lebih baik.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang penulis jabarkan, terdapat perbedaan dengan hasil penelitian yang penulis peroleh dari hasil wawancara yaitu dapat disimpulkan bahwa pengendalian dan pelayanan rehabilitasi gelandang dan pengemis di Kota Medan memiliki kendala yang hampir sama dengan kota besar lainnya, kendala yang di hadapi contohnya seperti sarana dan prasarana, sandang, dan identitas para gepeng yang sulit di ketahui.

Menurut Mitchel dalam Sedarmayanti (2018:35) ketepatan waktu adalah batas waktu dalam melakukan suatu pekerjaan, dimana waktu untuk menyelesaikan

pekerjaan telah ditentukan sebelumnya sehingga setiap melakukan pekerjaan terdapat tenggang waktu yang telah menjadi aturan dalam suatu organisasi

Effendi (2019) mengatakan bahwa ketepatan waktu merupakan suatu pemanfaatan informasi oleh pihak yang berkepentingan, sebelum informasi kehilangan kemampuan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sebuah informasi bisa tidak relevan jika informasi tersebut tidak tepat waktu. Terkait dengan penelitian ini yang menjadi rujukannya, penulis ingin membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu :

1. Arsyad (2021). Dengan judul Pemberdayaan Gelandang dan Pengemis Berbasis Pengelolaan Lahan oleh UPT Pelayanan Sosial Kota Binjai. Tujuan Penelitian ini adalah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan pengolahan lahan terhadap para gelandangan dan pengemis di UPT Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Binjai. Hasil dari Penelitian ini adalah Setelah melakukan penelitian ini peneliti menemukan bahwasannya awal mula terbentuknya wadah pelayanan sosial ini karena permasalahan kesejahteraan sosial dan para gelandangan dan pengemis dapat memperburuk pandangan wisatawan tentang kota Binjai apabila mereka datang untuk berkunjung. Materi pengolahan lahan yang disampaikan kepada para gelandangan dan pengemis tidak terlalu berat agar mereka dapat lebih mudah untuk memahami, yaitu:
  - a. Pelaksanaan Fisik, yang terdiri dari pembersihan lahan, pengolahan lahan sampai kondisi siap tanam, perbaikan kesuburan, dan perbaikan sarana dan prasarana.

- b. Pengelolaan, yang terdiri dari Pengolahan tanah, irigasi, pemupukan, pemulsaan, konservasi, pencegahan erosi, dan rernediasi.
2. Andre (2013). Dengan judul Pemberdayaan Gelandang dan Pengemis di Kabupaten Sidoarjo. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemberdayaan bagi gelandang dan pengemis di Kabupaten Sidoarjo, hasil dari penelitian ini pemberdayaan gelandangan dan pengemis di kabupaten sidoarjo (studi kasus di UPTD Liponsos Sidokare) melalui bimbingan keterampilan, bimbingan agama, bimbingan sosial dan bimbingan fisik yang mampu meningkatkan kesejahteraan gelandangan dan pengemis beserta keluarganya setelah keluar.
3. Nur (2022). Dengan judul Peranan Pemerintah dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Parepare. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peranan Pemerintah Kota Parepare Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Parepare Menurut Perspektif Siyasa Dusturiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Pemerintah Kota Parepare dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis sesuai dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum merupakan peraturan yang dimana dalam Pasal 15 mengatur larangan mengemis dan gelandangan. Dimana instansi yang bertanggung jawab menanggulangi adanya gelandangan dan pengemis tersebut adalah Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Parepare yaitu dengan melakukan penertiban, pendataan, dan pemberian arahan. Adapun beberapa hambatan dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis

yaitu belum adanya wadah atau panti rehabilitasi di Kota Parepare untuk menampung gelandangan dan pengemis guna membina pribadi mereka agar menjadi lebih baik sehingga dapat mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis Di Kota Parepare.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang penulis jabarkan, terdapat perbedaan dengan hasil penelitian yang penulis peroleh dari hasil wawancara yaitu dapat disimpulkan bahwa pengendalian dan pelayanan rehabilitasi gelandang dan pengemis membutuhkan tahapan dan proses agar dapat melakukan proses pengendalian dan rehabilitasi terhadap Gelandangan dan Pengemis.

Menurut KBBI, kerja sama artinya kegiatan atau usaha yang dilakukan beberapa orang, seperti lembaga, pemerintah, atau sejenisnya, untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu contoh penulisan kata kerja sama dalam kalimat, yakni “Kerja sama itu sangat menguntungkan kedua belah pihak.

Menurut Ahmadi (2004), kerjasama adalah merupakan usaha bersama dari dua orang atau lebih untuk melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Sebagaimana dikutip oleh Abu Ahmadi, Roucek dan Warren, mengatakan bahwa kerjasama berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.

Terkait dengan penelitian ini yang menjadi rujukannya, penulis ingin membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu :

1. Az-Zayyad (2019). Dengan judul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Gelandang dan Pengemis Di Kabupaten Banyumas, tujuan penelitian ini adalah a. Untuk mendeskripsikan secara detail bagaimana kebijakan

peraturan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas. b. Untuk menemukan dan menjelaskan sejauh mana implementasi penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas belum dilaksanakan secara sempurna, karena tujuan pemidanaan yang dimaksudkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat belura dapat dilaksanakan secara baik kepada gelandangan dan pengemis. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana tersebut adalah faktor struktur hukum (legal structure) yaitu terkait dengan kinerja aparat penegak hukum yang belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya faktor substansi hukum (legal substance) yaitu di dalam Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 belum ada aturan yang tegas bagi para gelandangan dan pengemis yang sudah berkali-kali terjaring razia/operasi, serta masih terdapat banyak kerancuan dalam substansi Perda tersebut. Kemudian yang terakhir adalah faktor budaya hukum (legal culture) yaitu masih adanya masyarakat yang memberikan uang/barang kepada gelandangan dan pengemis, serta sulitnya merubah pola pikir para gelandangan dan pengemis bahwa kegiatan menggelandang dan mengemis adalah sesuatu yang dilarang oleh hukum dan merendahkan martabat manusia.

2. Cahyani (2022). Dengan judul Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Pengemis Perspektif Fiqh Siyasah, tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam penanganan pengemis di Kota Bandar Lampung. 2. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyāsah terhadap peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam menangani masalah pengemis. Hasil Penelitian ini adalah Semakin padat jumlah penduduk disuatu kota maka semakin besar pula persaingan hidup dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari. Karena tidak semua masyarakat mampu bersaing demi memenuhi kebutuhan hidup, yang pada akibatnya demi mencari kebutuhan sebagian bagian masyarakat rela turun ke jalan menuju tempat-tempat umum dengan meminta-minta. Semakin bertambahnya jumlah pengemis, ini merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan. Keberadaan pengemis berasal dari berbagai permasalahan hidup yang dihadapi. Beberapa permasalahan yang dialami oleh pengemis adalah terkait dengan masalah kemiskinan, masalah pendidikan, masalah sosial budaya, masalah lingkungan. Serta masalah hukum dan kewarganegaraan.
3. Saraswati (2018). Dengan judul Pemberdayaan Gelandang dan Pengemis sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial Melalui Program Desaku Menanti, tujuan penelitian ini adalah 1. Mendeskripsikan dan menganalisis Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial melalui Program “Desaku Menanti” di Kota Malang. 2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan

penghambat Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial melalui Program “Desaku Menanti” di Kota Hasil Penelitian ini adalah menunjukkan upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang sebagai upaya rehabilitasi sosial yang dilakukan diantaranya 1) Penjangkauan dan Pemulangan Gelandangan dan Pengemis; 2) Bimbingan Fisik, Mental, dan Sosial; 3) Bimbingan Keterampilan; 4) Bantuan Stimulan UEP; 5) Jaminan Hidup; 6) Bantuan Stimulan; 7) Pengembalian Anak- Anak Gelandangan dan Pengemis ke Sekolah; 7) Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksesibilitas. Selain itu tahap-tahap pemberdayaan masyarakat, yaitu: 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku; 2) Tahap transformasi; 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan. Kemudian aktor-aktor yang terlibat dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan diantaranya: 1) Dinas Sosial; 2) LKS Mutiara Insani 3) Instansi Pemerintah Pusat: 4) Perguruan Tinggi: 5) Swasta. Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi, diantaranya: 1) Merubah mindset, mental, dan sikap SDM WBS Desaku Menanti; 2) Upaya Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksesibilitas; 3) Lokasi Program Desaku Menanti; 4) Kurangnya Sarana dan Prasarana. Sedangkan faktor pendukung yang mempengaruhi, diantaranya: 1) Dana yang mencukupi dalam proses pemberdayaan; 2) Kerjasama yang baik antar stakeholder.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang penulis jabarkan, terdapat perbedaan dengan hasil penelitian yang penulis peroleh dari hasil

wawancara yaitu dapat disimpulkan bahwa pengendalian dan pelayanan rehabilitasi gelandang dan pengemis membutuhkan koordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang agar dapat melakukan rehabilitasi gelandang dan pengemis dengan maksimal.

Pengertian sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan. Sedangkan pengertian prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

Terkait dengan penelitian ini yang menjadi rujukannya, penulis ingin membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu :

- a. Astari (2023). Dengan judul Implementasi Program Pembinaan Gelandang dan Pengemis (gepeng) di Dinas Sosial Kota Medan, tujuan penelitian ini adalah 1. Mendeskripsikan implementasi program pembinaan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Dinas Sosial Kota Medan. 2. Mengetahui faktor penghambat dalam implementasi program pembinaan Gelandangan dan pengemis (gepeng) di Dinas Sosial Kota Medan. Hasil Penelitian ini adalah menunjukkan bahwa implementasi program pembinaan gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kota Medan sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal karena terdapat beberapa hambatan yang dihadapi seperti kurangnya kesadaran gelandangan dan pengemis akan peraturan yang ada, kurangnya team petugas lapangan dalam penertiban gelandangan dan pengemis, dan tidak adanya Rumah Perlindungan Sosial dalam pembinaan gelandangan dan pengemis.

- b. Sinanu (2018). Dengan judul Penanganan Pengemis oleh Dinas Sosial Kota Malang. Tujuan Penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui peran dan upaya Dinas Sosial Kota Malang dalam penanganan pengemis di Kota Malang menurut Peraturan Daerah
- i. Untuk mengetahui pendapat ulama' syafi'iyah dalam perspektif Peraturan Daerah Kota Malang No 9 tahun 2013 terhadap penanganan pengemis di Kota Malang. Hasil penelitian ini adalah bahwa pekerja sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang sosial dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah. Telah dijelaskan di dalam peraturan daerah no 9 tahun 2013 di dalam pasal 6 bahwa anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang terkena penertiban ditampung dalam penampungan sementara untuk diidentifikasi dan diseleksi. Dimana dalam penjelasan pasal 6 menjelaskan bahwa kegiatan razia yang dilakukan oleh dinas sosial telah bekerja sama dengan satpol PP, dan kegiatan razia tersebut terlaksana, setelah itu mendatanya. Tugas-tugas yang ada telah dilaksanakan dan diterapkan oleh dinas sosial, seperti tugas razia pengemis, dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada pengemis agar dapat bekerja yang lebih layak dibanding menengadah tangan dibawah.
- c. Hidayah (2020). Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandang, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen juga faktor yang

mempengaruhi pengimplementasian kebijakan ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 belum mampu diterapkan secara efektif karena tujuan kebijakan ini belum bisa tercapai, terbukti dari data hasil patroli PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Dinas Sosial bahwa tiga tahun terakhir jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen justru semakin meningkat. Kedua dari segi sumberdaya manusia dan finansialnya Dinas Sosial masih mengalami kekurangan sehingga pelaksanaan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen ini belum maksimal. Ketiga, komunikasi dan koordinasi antara Dinas Sosial dengan pihak lain yang dapat terlibat masih sangat kurang. Terbukti yang masih berperan aktif untuk membantu pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen hanya YKP2N (Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkoba) padahal masih sangat banyak LSM yang sebetulnya bisa diajak berkoordinasi supaya pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen bisa terimplementasikan dengan sebaik-baiknya.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang penulis jabarkan, terdapat perbedaan dengan hasil penelitian yang penulis peroleh dari hasil wawancara yaitu dapat disimpulkan bahwa pengendalian dan pelayanan rehabilitasi gelandang dan pengemis membutuhkan sarana dan prasarana yang di sediakan pemerintah agar

lebih meningkatkan kualitas pelayanan dalam proses rehabilitasi gelandang dan pengemis.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Fungsi koordinasi diagonal dinas sosial dalam pengendalian dan pelayanan rehabilitasi gelandang dan pengemis di Kota Medan memiliki beberapa faktor yaitu meningkatnya jumlah penduduk, minimnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya jumlah urbanisasi sehingga menyebabkan semakin banyak jumlah gelandang dan pengemis di kota Medan, dengan adanya koordinasi diagonal Dinas Sosial diharapkan dapat mengurangi jumlah gelandang dan pengemis di Kota Medan. Namun ada beberapa kendala yang menyebabkan kurang maksimalnya terlaksana proses rehabilitasi gelandang dan pengemis yaitu di antaranya kurang maksimalnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah, identitas para gepeng yang sulit ditemukan, sehingga kurang maksimalnya pelayanan rehabilitasi terhadap gepeng di kota Medan.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa Koordinasi Diagonal Dinas Sosial dalam Pengendalian dan Pelayanan Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis di Kota Medan Adapun saran-saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Maksimalkan paya lebih lanjut untuk meningkatkan koordinasi antara dinas sosial dan pihak berwenang agar pelayanan Rehabilitasi Gepeng lebih maksimal.
2. Perbaiki sistem pelayanan Rehabilitasi agar dapat mengurangi angka Gepeng yang semakin melonjak di Kota Medan.
3. Tingkatkan kualitas pelayanan melalui sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah kota Medan untuk pelayanan rehabilitasi Gepeng yang lebih baik.
4. Pemerintah mencari faktor-faktor penyebab semakin melonjak nya jumlah Gepeng di Kota Medan agar mendapatkan solusi yang tepat terhadap permasalahan Gepeng di Kota Medan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A. (2004). *Sosiologi Pendidikan*. Rineka Cipta.
- Andre, P. S. (2013). Pemberdayaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus Di UPTD Liponsos Sidokare). *Upn Jatim*. <https://eprints.upnjatim.ac.id/4918/1/file1.pdf>
- Arsyad, A. (2021). *Pemberdayaan Gelandangan Dan Pengemis Berbasis Pengolahan Lahan oleh UPT Pelayanan Sosial Kota Binjai* [UINSU]. [http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/11281%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/11281/1/Skripsi A. Arsyad.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/11281%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/11281/1/Skripsi%20A.%20Arsyad.pdf)
- Astari, P. (2023). *Implementasi Program Pembinaan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di Dinas Sosial Kota Medan*. Universitas Medan Area.
- Az-Zayyad, M. F. (2019). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Banyumas* (Vol. 2).
- Cahyani, N. V. (2022). *Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Pengemis Perspektif Fiqh Siyāsah. (Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Creswell, J. W. (2016). *Reseach Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4th ed.). Pustaka Belajar.
- dinsos. (2022). *Mengurai Fenomena Gelandangan dan Pengemis di Indonesia*. Dinsos.Bandaacehkota.Go.Id. <https://dinsos.bandaacehkota.go.id/mengurai-fenomena-gelandangan-dan-pengemis-di-indonesia/>
- Effendi, B. (2019). Komite Audit, Profitabilitas, Solvabilitas, dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur-Sektor Logam. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 1(3), 149–157. <https://doi.org/10.35899/biej.v1i3.67>
- Fadri, Z. (2019). Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Di Yogyakarta. *Komunitas*, 10(1), 1–19. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1070>
- Galbraith, W. M. (1995). *Community Based Education Organizations and The Delivery of Lifelong Learning Oppurtunities, Commissioned Paper presented to the National Institute on Postsecondary Education, Libraries, and Lifelong Learning, Office of Educational Research and Improvemen*. US Department of Education.
- Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). *The Discovery of Grounded. Theory: Strategies for Qualitative Research*. Barney.
- Griffin, J. (2018). *Customer Loyalty. Menumbuhkan dan Mempertahankan Kesetiaan Pelanggan*. Erlangga.

- Handayani, S. (2011). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. CV. Haji Mas Agung.
- Handoko, T. H. (2020). *Manajemen Personalia & Sumber Daya Manusia*. BPFE.
- Hasan, H. S. (2021). Peranan Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru. In *Skripsi*. Universitas Islam Riau.
- Hasibuan, M. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revi)*. PT. Bumi Aksara.
- Hayati, R. (2019). *Pengertian Metode Pengumpulan Data, Jenis, dan Cara Menulisnya*. PenelitianIlmiah.Com. <https://penelitianilmiah.com/metode>
- Hidayah, E. S. (2020). Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 3(2), 84–97. <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i2.1103>
- Nur, M. Y. R. P. (2022). *Peranan Pemerintah Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Perspektif Siyasah Dusturiyah Tasyiriyah Undergraduate thesis*. IAIN PARE PARE.
- Putri, G. D. (2021). *Analisis Program Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru*.
- Saraswati, A. (2018). *Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial melalui Program Desaku Menanti (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang)*. Universitas Brawijaya.
- Sedarmayanti. (2018). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. CV. Mandar Maju.
- Sinanu, N. I. L. (2018). *Penanganan Dinas Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kota Malang*. Universitas Brawijaya.
- Sugandha, D. (2011). *Koordinasi, Alat Pemersatu Gerakan Administrasi*. Intermedia.
- Sutarto. (2015). *Dasar-Dasar Organisasi (Cetakan Ke)*. UGM Press.

## LAMPIRAN

### Lampiran I Dokumentasi di Dinas Sosial Kota Medan

Dokumentasi bersama Bapak Trisno Hutagalung,SH selaku kepala bidang

Rehabilitasi Gepeng



## Lampiran II SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi



**UMSU**  
Majelis Cendekia Muhammadiyah

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/DAN-PEAA/PPPTU/2022  
Pusat Adm. & Informatika Jalan Muhtar Sani No. 1 Medan 20218 Telp. (061) 9222400 - 06224507 Fax. (061) 922474 - 0621003  
@umsumedan \*\* Sate @umsu.ac.id | @umsumedan @umsumedan @umsumedan @umsumedan

Slc-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN  
JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth. Bapak/Ibu  
Program Studi **ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**  
FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 09 JANUARI .....2024

Atsallamu 'alaikum wa. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : LISEI RIMAYANI  
NPM : 2003100067  
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
SKS diperoleh : 133,0 SKS, IP Kumulatif .....

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Efektivitas Pengorganisasian Penerbitan Rekomendasi untuk Rehabilitasi dan penyandang disabilitas di kota Medan.	
2	Fungsi Koordinasi Diagonal Dinas sosial Dalam Pengendalian Dan Pelayanan Rehabilitasi Celandangan dan pengemis Di kota Medan.	B. 2024 <i>[Signature]</i>
3	Fungsi Pengawasan Eksternal Dinas sosial Dalam penanganan Nyanak jualan.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademis/Transkrip Nilai Semester yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

**Rekomendasi Ketua Program Studi:**  
Diteruskan kepada Dekan untuk  
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 09 JANUARI .....2024  
Ketua  
Program Studi **ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**  
*[Signature]*  
(ANANDI MARALINA, S.Pd., M.P.P.)  
NIDN: .....

Pemohon,  
*[Signature]*  
(LISEI RIMAYANI.....)  
Dosen Pembimbing yang ditunjuk  
Program Studi **ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**  
*[Signature]*  
(Dr. Siti Hajar, S.Pd., M.P.)  
NIDN: .....

**PB: Dr. Siti Hajar M.P.**



## Lampiran III SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi Dan Pembimbing



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Kita membangun negeri ini agar lebih baik  
dengan ilmu dan teknologi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/IBAN-PTIAK.KPI/PT/002/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (081) 8622400 - 60224567 Fax. (081) 8625474 - 6031903  
@hpsd@fap.umsumedan.id \*\*fslp@umsumedan.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-2

### SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI DAN PEMBIMBING

Nomor : 110/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 08 Januari 2024, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **LISTI RIMAYANI**  
N P M : 2003100067  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2023/2024  
Judul Skripsi : **FUNGSI KOORDINASI DIAGONAL DINAS SOSIAL DALAM  
PENGENDALIAN DAN PELAYANAN REHABILITASI  
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA MEDAN**

Pembimbing : **Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.ĀP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 010.20.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 08 Januari 2025.

Ditetapkan di Medan,  
Pada Tanggal, 05 Rajab 1445 H  
17 Januari 2024 M

Dekan  
  
**Dr. ARIFIN SATEH, S.Sos., MSP.**  
NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



## Lampiran IV SK-3 Permohonan Seminar Proposal

  
 MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1013/SK/BAH-PT/AK-RP/PT/02/2022  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Dasri No. 3 Medan 20228 Telp. (061) 6627406 - 66224967 Fks. (061) 6626474 - 6631003  
 @umsu@umsu.ac.id \*telp@umsu.ac.id #umsu@umsu.ac.id #umsu@umsu.ac.id #umsu@umsu.ac.id #umsu@umsu.ac.id #umsu@umsu.ac.id

Sk-3

**PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Kepada Yth. Medan, 17, Maret, 2024  
 Bapak Dekan FISIP UMSU  
 di  
 Medan.

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : LISTI RIMAYANI  
 N P M : 2.005100067  
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor...../SK/II.3.AU/UMSU-03/P/20..... tanggal..... dengan judul sebagai berikut :

Fungsi Koordinasi Diagonal Pemas sosial dalam Pengendalian dan Pelayanan Kelangkaan Gelandangan dan pengemis di Kota Medan.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK-1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan,
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Mengetahui,  
 Pembimbing AYU PRATIWI MP  
 (ANANDA AMARDEKA)  
 NIDN:

Pemohon,  
LISTI RIMAYANI



## Lampiran V Surat Pernyataan Telah Mengajukan Permohonan Ujian Skripsi

 <b>UMSU</b> Unggul   Cerdas   Terpercaya <small>Bila mengunggah surat ini agar disertakan nomor dan tanggalnya</small>	MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH <b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA</b> <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KPIPTXU/2022 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003 <a href="https://fkip.umsu.ac.id">https://fkip.umsu.ac.id</a> <a href="mailto:fkip@umsu.ac.id">fkip@umsu.ac.id</a> <a href="#">umsumedan</a> <a href="#">umsumedan</a> <a href="#">umsumedan</a> <a href="#">umsumedan</a>
	<b>SK-7</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<i>Bismillahirrohmanirrohiem.</i>	
Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :	
Nama Lengkap	:
Tempat, Tgl. Lahir	:
Agama :	Islam/ Kristen/ Katolik/ Hindu/ Budha*
Status Perkawinan	: Kawin/ Belum Kawin/ Duda/ Janda*
N P M :	
Alamat Rumah	:
	.Telp/ HP.
Pekerjaan/Instansi	:
Alamat Kantor	:
	Telp/ HP.
melalui surat permohonan tertanggal ..... telah mengajukan permohonan menempuh Ujian Skripsi. Untuk ujian skripsi yang akan saya tempuh, menyatakan dengan sesungguhnya :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.</li> <li>2. Bahwa saya siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari Penguji.</li> <li>3. Bahwa saya bersedia menerima keputusan yang ditetapkan oleh Panitia Penguji Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun juga.</li> <li>4. Saya menyadari bahwa keputusan Panitia Penguji ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.</li> </ol>	
Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan atau tekanan dalam bentuk apa pun dan dari siapa pun, untuk dipergunakan bilamana dipandang perlu. Semoga Allah SWT. meridhoi saya. Amien.-	
	Saya yang menyatakan, <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 10px;">           Meteral            tempel            Rp. 10.000         </div>
	_____
  	

Lampiran VI SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 623/UND/011.3/AJ/UMSU-Q3/FP/2024

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Sabtu, 22 Maret 2024  
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : R. 209 Gedung C, LI 2  
Pemimpin Seminar : ANNANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.S.P.



SK-4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PEMANGGAP	PEREMBERS	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	PUTRI NALISYA	20031000037	Dr. JENNI RICHARDHANSYAH, S.Sos., M.Si	Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.S.P.	APLIKASI E-TILING DALAM MENYUJUKAN KOTA MEDAN SEBAGAI SMART CITY
2	MUR UBAHDIKHAH ZAFRO	20031000036	KOLING SARIFUTTA, S.Sos., M.S.P.	MUHAMMAD RULI, S.Sos., M.P.A.	PERKEMBANGAN DISCRETING LUBAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERBANKAN LUBAH DI KANTOR LUBAH HARJOSSARI II
3	DEGA ISMAYATI	20031000031	IDA MARTINELLI, S.H.	Dr. JENNI RICHARDHANSYAH, S.Sos., M.Si	INFLUENTIASI KESUKSESAN TENANG LUBAH DALAM PERCAKUPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KOTA MEDAN
4	LESTI SIKAWANI	20031000037	Assoc. Prof. Dra. H. SYAFIYUDDIN, M.P., Ph.D.	Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.S.P.	FUNGSI KOGNITIF DAN EMOSIONAL DALAM PERENCANAAN DAN PELAYANAN KEHARUKAN BELAJARAN DAN PERSEKUTUAN KOTA MEDAN
5	DAUTYA MELVAHICHA	20031000035	Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.S.P.	IDA MARTINELLI, S.H.	Pengaruh Perilaku dan Budaya Perilaku Masyarakat Desa Berbudaya dalam Mendukung Sukses Tindakan di Desa 800 Mumpaka Kabupaten Mandailing Natal

Medan, 18 Maret 2024  
2024  
ANNANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.S.P.  
MOP  
STRAS

## Lampiran VII Pedoman Wawancara

### DRAFT WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : FUNGSI KOORDINASI DIAGONAL DINAS SOSIAL  
DALAM PENGENDALIAN DAN PELAYANAN  
REHABILITASI GELANDANG DAN PENGEMIS  
DI KOTA MEDAN

Nama Peneliti : Listi Rimayani (2003100067)

Program Studi/Fakultas : Ilmu Administrasi Publik/ Ilmu Sosial & Ilmu Politik

**a. Adanya tahapan dalam pengendalian dan pelayanan rehabilitasi gelandang dan pengemis**

1. Bagaimana tahapan koordinasi diagonal yang dilakukan dinas sosial dalam proses pelayanan rehabilitasi kepada gelandang dan pengemis agar dapat berlangsung dengan baik ?
2. Apa saja kendala yang dinas sosial alami pada saat proses pelayanan rehabilitasi gelandang dan pengemis ?
3. Setelah selesai melakukan proses rehabilitasi, apakah gepeng dilepaskan begitu saja ? Atau dilakukan pengecekan secara berkala ?

**b. Adanya ketepatan waktu dalam proses rehabilitasi gelandang dan pengemis di dinas sosial.**

1. Berapa lama waktu yang di butuhkan dalam proses rehabilitasi untuk tiap gelandang dan pengemis yang di rehabilitasi ?
2. Apalagi melakukan koordinasi dengan dinas terkait seperti satpol PP apakah dapat memanilisir waktu yang digunakan pada saat melakukan rehabilitasi ?

**c. Adanya kerja sama antar unit di dinas sosial dalam pengendalian dan pelayanan rehabilitasi gelandang dan pengemis di dinas sosial.**

1. Koordinasi apa yang dilakukan setiap unit di dinas sosial untuk menunjang pelayanan rehabilitasi Gelandang dan pengemis ?

## Lampiran VIII Surat Permohonan Izin Penelitian



MAJLIS PEMBUNYAN TINGGI PENILAIAN & PENGEMBANGAN KEMERDEKAAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi/Depdiknas/Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 10120/2008/PTK/AN/PT/010102  
 Pusat Administrasi: Jalan Mulia No. 1 Medan 20221 Telp. (061) 4223200 - 4223401 Fax. (061) 4223410 - 4223101  
 @ https://isp.umma.ac.id \* info@umma.ac.id # ummaonline @ummaonline @ummaonline

Nomor : 666/KET/II.3.A/UMSU-01/F/2024  
 Lampiran : -/-  
 Hal : Melakui Diberkas Izin Penelitian Mahasiswa

Medan, 21 Syawal 1443 H  
 30 April 2024 M

Kepada Yth : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan  
 di-

Tempat,

Bismillahirrahmanirrahim  
 Assalamu'alaikum Wt.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami.

Nama Mahasiswa : LESTI RIMAYANI  
 N P M : 2003100067  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2023/2024  
 Judul Skripsi : FUNGSI KOORDINASI DIAGONAL DINAS SOSIAL DALAM PENGELOMPOKAN DAN PELAYANAN REHABILITASI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA MEDAN

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaannya memberikan izin penelitian disamping terima kasih. Wassalamu'alaikum Wt. Wb.

Cc: File

Ditanda,  
  
  
**Dr. ARIF ALEH, S.Sos., MSP.**  
 NIDN. 9010017402



## Lampiran IX Surat Keterangan Izin Penelitian



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**  
 Jalan Jendral Besar A, 81 Masjid Negeri 12, Medan Johor, Medan Sumatera Utara 20141.  
 Telepon (061) 787403 Faksimili (061) 7875114  
 Email: [info@pemerintahkota.medan.go.id](mailto:info@pemerintahkota.medan.go.id) / [info@badanrisetkota.medan.go.id](mailto:info@badanrisetkota.medan.go.id)

---

**SURAT KETERANGAN RISET**  
 Nomor : 000.9/1058

**DASAR** : 1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.  
 2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

**MENYANGGUT** : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 999/KET/8.3.AJ/UMSU-03/P/2024 Tanggal 30 April 2024 Perihal Mohon Oborikan Izin Penelitian Mahasiswa.

---

**NAMA** : Lili Rizyanti  
**NIM** : 2003100067  
**JURUSAN** : Ilmu Administrasi Publik  
**JUDUL** : "Fungsi Koordinasi Diagenal Dinas Sosial Dalam Pengendalian dan Pelayanan Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis di Kota Medan"  
**LOKASI** : Dinas Sosial Kota Medan  
**LAMANYA** : 1 (satu) Bulan  
**PENANGGUNG JAWAB** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Laporan Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk softcopy atau melalui Email ([info@pemerintahkota.medan.go.id](mailto:info@pemerintahkota.medan.go.id)).
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dengan Surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan  
 Pada Tanggal : 13 Mei 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh  
 Kepala Badan  
 Riset dan Inovasi Daerah,  
 M. Hidayat, S. Sos., M. AP  
 Pejabat T. I. J. N. G.  
 NP 10000001000001001

**Tembusan:**

1. Wali Kota Medan.
2. Kepala Dinas Sosial Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

---



Dokumen ini dihasilkan secara otomatis menggunakan aplikasi eKantori.com dan tidak dapat  
 diubah. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Admin eKantori di nomor kontak yang tertera pada  
 aplikasi.

## Lampiran X Surat Keterangan Bebas Pustaka



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**PERPUSTAKAAN**

Terakreditasi A Berdasarkan Ketetapan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP/PT/IX/2018  
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567  
 NPP: 127129201000001 | <http://perpustakaan.umsu.ac.id> | [perpustakaan@umsu.ac.id](mailto:perpustakaan@umsu.ac.id) | [perpustakaan\\_umsu](https://www.perpustakaan_umsu.ac.id)

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
 Bila mempunyai surat ini, agar dibuktikan  
 nomor dan tanggalnya

### SURAT KETERANGAN

Nomor: 01652/KET/II.7-AU/UMSU-P/M/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : LISTI RIMAYANI  
 NPM : 2003100067  
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
 Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 18 Muharram 1446 H  
 25 Juli 2024 M

Kepala Perpustakaan,

Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.

## Lampiran XI Surat LoA JAPK



### LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

**Dear Ms. Listi Rimayani**

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, Garuda, E-2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper "*Fungsi Koordinasi Diagonal Dinas Sosial Dalam Pengendalian Dan Pelayanan Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis di Kota Medan*" has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 4 No 2 December (2024). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

**Medan, July 29, 2024**

**Editor In Chief**

  
**(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)**  
**NIDN. 0104089401**

*Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>  
Contact: 082160559891*

## Lampiran XII Daftar Riwayat Hidup

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### Data Pribadi

Nama : Listi Rimayani  
Tempat/Tanggal Lahir : Muarasoma, 24 April 2003  
NPM : 2003100067  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Muarasoma, Kec. Batang Natal, Kab. Mandailing Natal  
No. Telepon : 082369661185  
E-Mail : [listirimayani@gmail.com](mailto:listirimayani@gmail.com)  
Anak ke : 3 (tiga) dari 5 (lima) bersaudara

#### Data Orangtua

Nama Ayah : Alias Taufik Helmi Nasution  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Nama Ibu : Mariana Rambe  
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta  
Alamat : Muarasoma, Kec. Batang Natal, Kab. Mandailing Natal

#### Riwayat Pendidikan

1. 2008-2014 : SD Negeri 255 Muarasoma
2. 2014-2017 : SMP Negeri 1 Batang Natal
3. 2017-2020 : SMA Negeri 1 Batang Natal
4. 2020-2024 : S-1 Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU

Demikian riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 27 Juli 2024



Listi Rimayani